

Pengaruh Ketidakseimbangan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Lativa¹; Sutiman²; Rudi Sanjaya³

¹⁻³ Universitas Pamulang. Email: dosen01207@unpam.ac.id

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT

JURNAL SEKURITAS

(Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)

Vol.7, No.1, September 2023
Halaman : 17– 31

© LPPM & Prodi Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777
ISSN (print) : 2581-2696

Keyword :

Ketidakseimbangan Realisasi Anggaran, Kinerja Instansi Pemerintah

JEL. Classification:

C33, G21, G24, N15, N25

Permalink:

DOI: [10.32493/skt.v6i1.29746](https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.29746)

Article info :

Received : Juni 2023
Revised : Juli 2023
Accepted : Agustus 2023

Licenses :



<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Contact :

PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1
Pamulang Tangsel– Banten
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email : sekuritas@unpam.ac.id

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dalam realisasi anggaran dan bagaimana hal itu berdampak pada kinerja pemerintah. Hasil penelitian hipotesis menunjukkan bahwa nilai hitung lebih besar daripada ttabel ($-0,237 > -3,490$), dengan signifikansi $0,004 < 0,05$. Kesimpulannya adalah bahwa perbedaan realisasi anggaran belanja pegawai berdampak positif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah. Nilai hitung $-0,872$ lebih besar daripada ttabel ($-13,044$), dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah bahwa ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja barang berdampak positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tidak terpengaruh oleh ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja modal.

This study uses reports on the realization of the budget of the Directorate General of Public Health, Ministry of Health of the Republic of Indonesia from 2016 to 2020. The purpose of this research is to find out the difference in budget realization and how it impacts government performance. The results of the research hypothesis show that the calculated value is greater than the ttable ($-0.237 > -3.490$), with a significance of $0.004 < 0.05$. The conclusion is that differences in the realization of personnel expenditure budgets have a positive and significant impact on the efficiency of government performance. The calculated value of -0.872 is greater than the ttable (-13.044), with a significance of $0.000 < 0.05$. The conclusion is that the imbalance in the realization of the goods budget has a positive impact. Therefore, it can be concluded that the efficiency of government performance at the Directorate General of Public Health is not affected by an imbalance in the realization of the capital expenditure budget.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Dalam kebanyakan kasus, lembaga pemerintah didirikan untuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan masyarakat. Tujuan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan layanan dan memberikan kemampuan untuk meningkatkan layanan tersebut di masa mendatang daripada menghasilkan keuntungan. Masyarakat dunia perlu menghadapi era globalisasi. Sebagai anggota masyarakat global, Indonesia harus terus membangun pemerintahan yang baik untuk mendukung persaingan di era modern. Untuk mengikuti paradigma baru ini, pemerintah memberi otonomi kepada daerah. Mereka dapat mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri dengan cara ini, sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan untuk membantu masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, semua pengelola keuangan negara harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang lebih luas dan tepat waktu. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud harus dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional (laporan arus kas), dan catatan atas laporan keuangan. Mereka terdiri dari informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel yang berasal dari SAP.

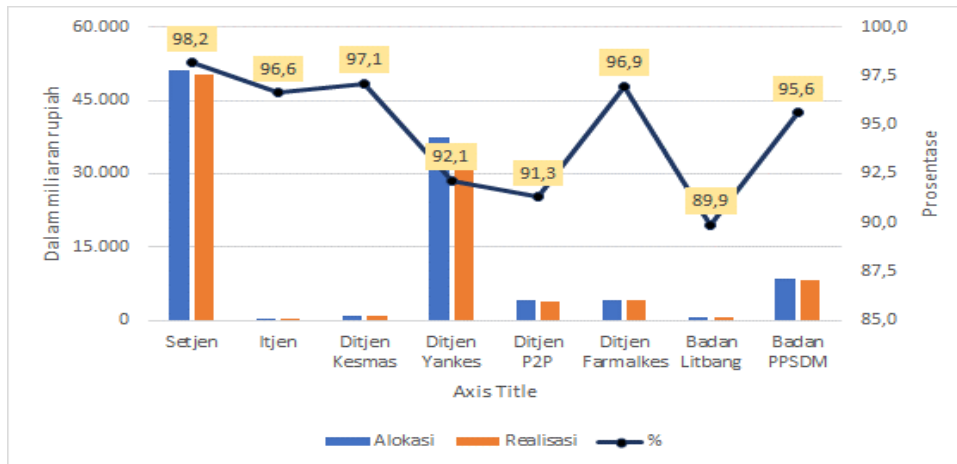
Kementerian Kesehatan dibuat untuk membantu Presiden Republik Indonesia menjalankan kebijakan kesehatan negara. Sistem kesehatan nasional mencakup pembiayaan kesehatan. Jumlah uang yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai program kesehatan yang diperlukan oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat disebut sebagai pembiayaan kesehatan sendiri. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembiayaan kesehatan adalah untuk memastikan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, didistribusikan secara adil, dan dimanfaatkan secara efektif. Anggaran kesehatan sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah, sedangkan anggaran masyarakat berasal dari anggaran pemerintah, yang terdiri dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kesehatan, serta anggaran kesehatan Kementerian Kesehatan. Ada juga penjelasan tambahan tentang Jaminan Kesehatan Nasional.



Gambar 1. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2016 – 2020

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

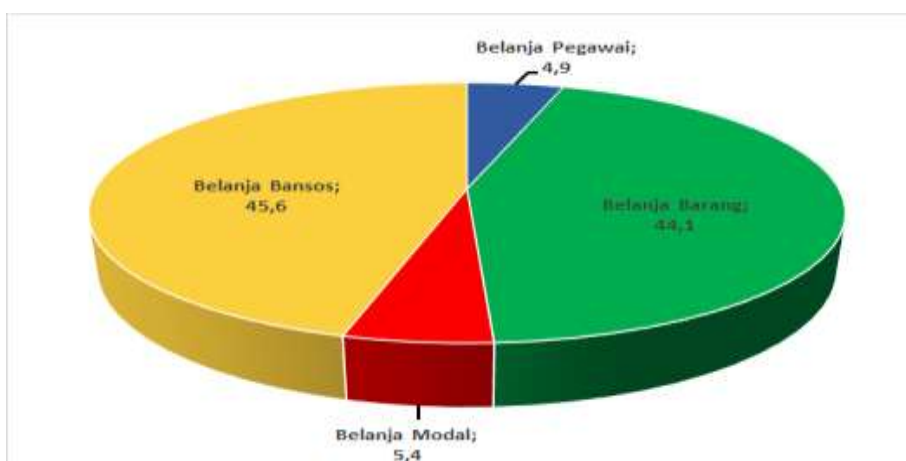
Dalam lima tahun terakhir, anggaran Kementerian Kesehatan telah meningkat baik dalam alokasi maupun realisasinya. Gambar 1 menunjukkan peningkatan alokasi anggaran sebesar 65,6 trilyun rupiah pada tahun 2016 dan realisasi sebesar 57,0 trilyun rupiah, dengan persentase realisasi sebesar 86,8%. Pada tahun 2020, alokasi anggaran meningkat menjadi 107,0 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 102,2 trilyun rupiah.



Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Sekretariat Jenderal (Setjen) menerima anggaran terbesar sebesar 51,1 trilyun rupiah, sedangkan Inspektorat Jenderal menerima anggaran terendah sebesar 81,4 miliar rupiah, menurut unit kerja eselon I Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Badan Penilitian dan Penelitian Kesehatan memiliki persentase realisasi anggaran terendah, dengan 96,9% untuk Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes).

Dari 107,0 trilyun rupiah yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan, 48,7 trilyun rupiah, atau 45,6%, dialokasikan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, 54,4% anggaran tambahan untuk Kementerian Kesehatan dialokasikan untuk biaya pegawai sebesar 4,9%. Belanja barang sebesar 44,1% dan belanja modal sebesar 5,4% masing-masing ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Persentase Anggaran Kementerian Kesehatan RI Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020
Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 s.d. 2020

Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77%	73%	100,4%	81%	82,8%	102,2%	82%	98,6%	120,3%	85%	91,8%	108%	87%	81,1%	93,3%
presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	22,7%	16,2%	136,7%	21,2%	14,8%	143,2%	19,7%	17,3%	113,8%	18,2%	9,9%	183,8%	16%	9,7%	164,9%
Presentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	78%	78,1%	100,1%	81%	89,2%	110,9%									
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan	3	3	3												
Presentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	50%	53,3%	105%												
Presentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	25%	33,5%	133,8%				35%	57,8%	165,1%	40%	78%	195%			
Presentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan													40%	37,30%	70%
Presentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat													30%	21%	70%

Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 s.d. 2020

Anggaran sektor swasta dan publik berbeda. Anggaran perusahaan di sektor privat tidak diketahui umum. Di sektor publik, sebaliknya, publik harus diberitahu tentang anggaran dan diminta untuk memberikan kritik. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang ditunjukkan dalam rencana perolehan dan belanja dalam satuan moneter (Bastian, 2013:69).

Rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya biasanya diubah saat implementasi. Anggaran Perubahan dan Anggaran Murni adalah pilihan yang tepat. Anggaran Perubahan adalah anggaran yang dibuat setelah RAPBN berjalan, sedangkan Anggaran Murni adalah anggaran yang dibuat sebelum RAPBN dibuat. Perbedaan yang signifikan antara hasil yang diharapkan dan anggaran yang ditetapkan merupakan masalah utama. Kemampuan Kementerian untuk membuat anggaran ditunjukkan secara tidak langsung oleh angka-angka ini.

Memperkirakan perkembangan masa depan adalah bagian penting dari pembuatan anggaran secara teknis. Perubahan eksternal sulit diprediksi karena berada di luar kendali, tetapi keadaan internal harus dapat diterima dengan baik. Anggaran yang tepat akan bergantung pada kemampuan untuk merencanakan masa depan dengan cara ini. Perbedaan antara anggaran dan hasilnya adalah salah satu cara untuk mengukur "keberhasilan" penyusunan anggaran. Oleh karena itu, penyusun biasanya mencari aman dengan menetapkan anggaran pada angka yang relatif rendah untuk membuatnya mudah dilaksanakan.

Menurut manajemen keuangan, masalah perbedaan anggaran ini terkait dengan laporan keuangan yang rumit. Anda dapat mengetahui apakah informasi keuangan mengandung informasi dan seberapa besar (atau berguna) informasinya. Selain itu, data yang diberikan menunjukkan validitas teori komparatif. Teori ini menyatakan bahwa daerah yang miskin



cenderung menetapkan anggaran pendapatan yang terlalu tinggi (overestimate revenue) dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya; di sisi lain, daerah yang lebih kaya cenderung menetapkan anggaran belanja yang terlalu rendah.

Dari sudut pandang teori keagenan, munculnya perbedaan anggaran menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut tidak lengkap. Kementerian Kesehatan, sebagai agen, memiliki lebih banyak data tentang anggaran dan laporan keuangannya, termasuk perubahan yang terjadi. Sebaliknya, masyarakat umum (sebagai prinsipal) hanya dapat mengetahui laporan keuangan setelah dipublikasikan, meskipun laporan anggaran perubahan juga diumumkan. Pihak yang memiliki lebih banyak informasi dapat menggunakan kekurangtahuan orang lain untuk membuat mereka tidak termotivasi untuk mengungkapkannya. Semua ini membuat semua pihak tidak efektif (Stiglitz, 1988). Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi dimulai dengan mengevaluasi perbedaan antara hasil yang dicapai dan laporan perhitungan anggaran yang akan dituju.

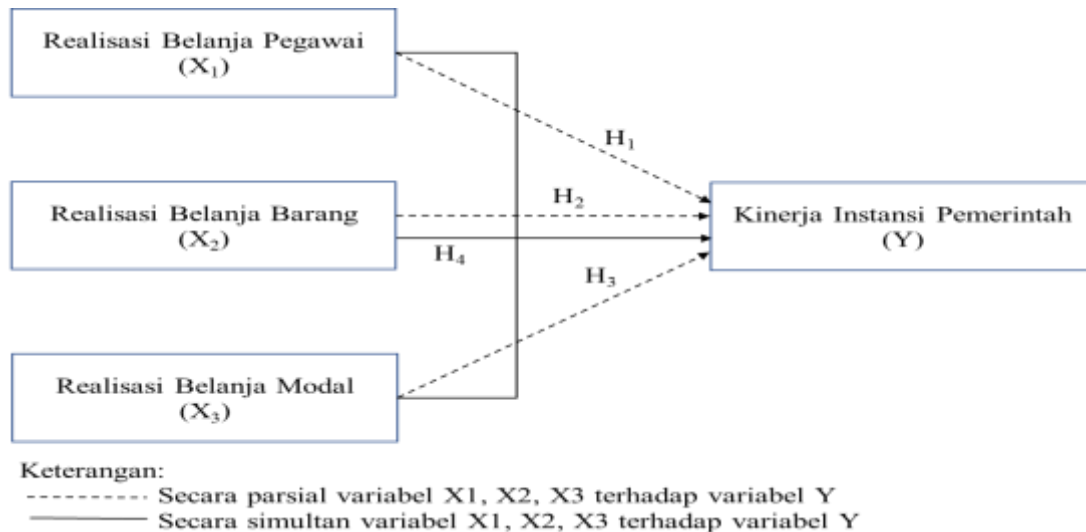
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat sistem pengelolaan keuangan yang teratur, taat pada peraturan, dan bertanggung jawab. Penganggaran berbasis kinerja adalah cara terbaik untuk menghasilkan anggaran pemerintah yang efektif dan efisien. Program dapat dirancang dan diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan anggaran kinerja yang berfokus pada input, output, dan outcome (Handoko, 2014:2).

B. KAJIAN LITERATUR

Mardalena dan Sarinah (2017:7) mengatakan bahwa manajemen adalah proses mencapai tujuan dengan bekerja sama dengan orang lain dan sumber daya organisasi lainnya. David Wijaya (2017:2) berpendapat bahwa manajemen keuangan mencakup hal-hal seperti perencanaan keuangan, anggaran, kas, kredit, analisis investasi, dan upaya untuk memperoleh dana. Harahap (2013:05) mengatakan bahwa laporan keuangan mewakili semua aspek pengelolaan keuangan.

Menurut Pendapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006, kinerja adalah hasil atau hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur.

Nafarin (2013:11) menyatakan bahwa "Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa." Erlina Rasdianto (2013:23) menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa ketika menyusun anggaran, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dalam penelitian ini, kami akan membandingkan anggaran pegawai, barang, dan belanja modal dengan apa yang telah dilakukan, sehingga kami dapat mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan dalam kualitas layanan. Hipotesis penelitian berikut dapat dibuat berdasarkan kajian literatur dan kerangka pemikiran:

1. Pengaruh ketidakseimbangan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Kinerja Pemerintah

Belanja pegawai adalah semua anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik di dalam maupun di luar negeri, atas pekerjaan mereka, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Hasil penelitian Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja pegawai secara statistik mempengaruhi kemandirian pembangunan daerah kabupaten Indramayu secara signifikan dan memiliki koefisien negatif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa, dalam struktur APBD kabupaten Indramayu, lebih banyak uang dialokasikan untuk belanja rutin daripada yang lain.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Palilingan et al. (2015) menunjukkan bahwa operasi pemerintah telah menghasilkan pengeluaran yang efektif. Selain itu, Handoko (2014) menyatakan bahwa kinerja pemerintah telah menghasilkan anggaran belanja yang efektif. Perwira (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan telah efektif, dan Dale (2013) menunjukkan bahwa kinerja belanja telah efektif.

Jika sistem tatanan pemerintahan berjalan dengan baik, perangkat daerah dapat mencapai kemandirian. Belanja pegawai berfungsi sebagai kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dan sebagai katalisator untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Berdasarkan temuan studi empiris di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:

H1 : ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah.

2. Pengaruh ketidakseimbangan Realisasi Anggaran Belanja Barang Terhadap Kinerja Pemerintah

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan barang habis pakai, persediaan inventaris kantor, perjalanan dinas, dan rapat. Belanja barang dan jasa sangat penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ketika belanja barang dan jasa selesai, karyawan dapat melakukan tindakan pelayanan publik dengan cepat. Kinerja pemerintah diharapkan meningkat dengan kecepatan pelayanan publik ini. Menurut sejumlah penelitian empiris, termasuk Muhibtari (2014), tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sangat tinggi. Selain itu, Fahrianta dan Carolina (2012) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja menunjukkan pengelolaan yang efektif; tidak ada realisasi anggaran yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan temuan studi empiris di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:

H2 : ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja barang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah.

3. Pengaruh ketidakseimbangan Realisasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah

Pemerintah akan membelanjakan modalnya untuk membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan negara. Belanja modal yang besar adalah hasil dari banyaknya sarana dan infrastruktur yang dibangun. Secara logis, semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan menghasilkan lebih banyak hasil, karena semakin banyak sumber yang menghasilkan, semakin baik kinerja keuangan daerah.

Belanja modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah, menurut hasil penelitian Astiti dan Mimba (2016). Banyak dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan memungkinkan pembangunan infrastruktur dan sarana yang lebih banyak. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah akan memungkinkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

Dengan cara yang sama, Darwis (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berdampak negatif dan signifikan pada kemandirian keuangan daerah. Jika sistem tatanan pemerintahan berjalan dengan baik, perangkat daerah dapat mencapai kemandirian. Belanja pegawai berfungsi sebagai kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dan sebagai katalisator untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan pembangunan daerah. Selain itu, Daling (2013) menunjukkan bahwa kinerja belanja sudah efektif. Ini dapat dilihat dari seberapa kecil anggaran yang digunakan daripada yang dianggarkan. Selain itu, Budiman dan Wokas (2015) menunjukkan bahwa pemerintah telah menggunakan anggaran dengan efisien, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah uang yang dikeluarkan lebih sedikit daripada yang dialokasikan.

Berdasarkan temuan studi empiris di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:

H3 : ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja modal berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 4-9, Jakarta 12950. Data dikumpulkan dari Direktorat Kesehatan Keluarga, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat, dan Direktorat Kesehatan Lingkungan. Metode kuantitatif deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis digunakan dalam penelitian ini.



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terdapat 215 sampel (n), dimana nilai minimum variabel ketidakseimbangan realisasi minimum belanja pegawai adalah sebesar 81.05% berada di Satker BKTM Makassar dan nilai maksimum sebesar 99,59% terjadi pada BKOM Bandung. Sedangkan nilai mean adalah sebesar 92,9805 dengan standar deviasi yang lebih kecil yaitu 5,89355 menunjukkan tidak terjadinya dampak yang tinggi dari nilai minimum dan maksimum pada belanja pegawai.

Variabel ketidakseimbangan realisasi belanja barang, diperoleh nilai minimum sebesar 31,96% terjadi pada Satker Dinas Kesehatan Propinsi Maluku pada tahun 2016, sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 100,00% terjadi pada Satker Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu pada tahun 2020. Nilai mean adalah sebesar 85,0157 dengan standar deviasi yang lebih rendah yaitu 15,86364 menunjukkan dampak yang rendah antara nilai minimum dan maksimum pada belanja barang.

Sedangkan pada variabel ketidakseimbangan realisasi belanja modal, diperoleh nilai minimum sebesar 39,76% terjadi pada Satker Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019, nilai maksimum adalah sebesar 100,00% terjadi pada Satker Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2020 dan nilai mean sebesar 92,2700 dengan standar deviasi yang lebih rendah yaitu sebesar 12,90449 menunjukkan dampak yang rendah antara nilai minimum dan maksimum dari variabel belanja modal. Adapun untuk variabel efisiensi kinerja pemerintah, diperoleh nilai minimum sebesar 1,00% terjadi pada Satker Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2020, nilai maksimum sebesar 3,13% terjadi pada Satker Dinas Kesehatan Propinsi Maluku pada tahun 2016 dan nilai mean sebesar 1,2364 dengan standar deviasi yang lebih rendah yaitu sebesar 0,34470 menunjukkan dampak yang rendah antara nilai minimum dan maksimum dari variabel efisiensi kinerja pemerintah.

Hal tersebut di atas dapat ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Pegawai	215	81,05	99,59	92,9805	5,89355
Belanja Barang	215	31,96	100,00	85,0157	15,86364
Belanja Modal	215	39,76	100,00	92,2700	12,90449
Efisiensi	215	1,00	3,13	1,2364	0,34470
Valid N (listwise)	215				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Karena nilai toleransi masing-masing variabel di atas 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel di bawah 10, hasil uji multikolonieritas pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tidak ada multikolonieritas pada ketiga variabel independen. Oleh karena itu, kinerja pemerintah selama periode pengamatan dapat diprediksi dengan menggunakan ketiga variabel independen.

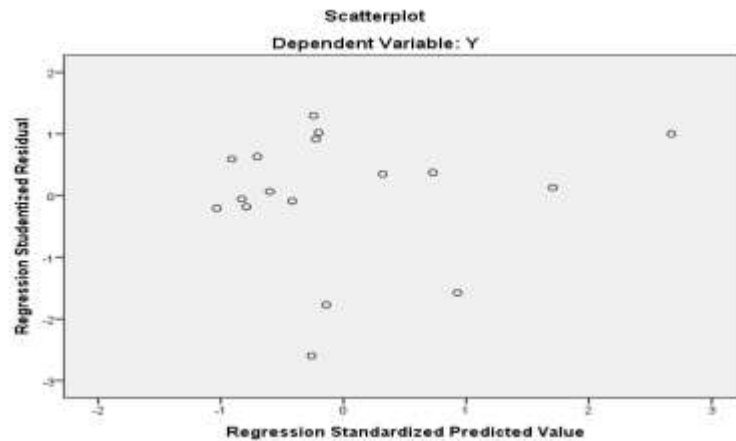


Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas

No.	Model	Coefficients	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Belanja Pegawai (X_1)	0,854	1,171
2	Belanja Barang (X_2)	0,879	1,138
3	Belanja Modal (X_3)	0,961	1,041

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

b. Uji Heterokedastisitas



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

Menurut grafik scatterplot berikut, titik-titik tersebar secara acak, berada di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, tidak berkumpul di satu tempat, dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi, dan varian semua variabel ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pemerintah.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.3 Autokorelasi

Durbin-Watson
1,901

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

Tabel sebelumnya menunjukkan nilai Durbin Watson 1,901. Nilai ini berada di antara nilai dU dan (4-dU), yaitu antara 1,793 dan 2,207. Ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier

Tabel 4.4 Persamaan Regresi

Persamaan	Model
Persamaan	$Y = 1,929 - 0,026 X_1 - 0,065 X_2 - 0,002 X_3 + \varepsilon$

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

Persamaan:

Nilai variabel efisiensi (Y_1) tidak dipengaruhi oleh variabel bebas, dengan nilai konstanta 1,929. Nilai koefisien regresi (X_1) sebesar -0,026 menunjukkan pengaruh variabel belanja pegawai (X_1) terhadap efisiensi (Y_1). Nilai koefisien regresi (X_2) sebesar -0,065 menunjukkan pengaruh variabel belanja barang (X_2) terhadap efisiensi (Y_1). Nilai koefisien regresi (X_3) sebesar -0,002 menunjukkan pengaruh variabel belanja.



b. Uji Koefisien Determinasi (adjusted R²)

Tabel 4.5 menunjukkan nilai koefisien determinasi untuk variabel efisiensi kinerja pemerintah sebesar 0,949. Ini menunjukkan bahwa 94,9% dari variasi efisiensi kinerja pemerintah disebabkan oleh variasi dari tiga variabel independen—realisasi belanja pegawai, realisasi belanja barang, dan realisasi belanja modal—sedangkan 5,1% yang tersisa disebabkan oleh alasan lain di luar model regresi. Berdasarkan uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel 4.5, kami menemukan nilai R Square Efisiensi sebesar 0,949, yang menunjukkan bahwa Belanja Pegawai (X₁), Belanja Barang (X₂) dan Belanja Modal (X₃) dapat berkontribusi pada Efisiensi (Y₁) sebesar 94,9%.

Tabel 4.5 Uji Koefisien Deteminasi

Model Summary	
Model	R Square
1 Efisiensi	0,949

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

c. Uji perhitungan *Good of Fitness*

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan *Good of Fitness*

ANOVA		
Model	F	Sig.
1 Efisiensi	80.564	.000 ^b

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

Dari tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa nilai F sebesar 80,564 dan nilai signifikan sebesar 0,000 diperoleh sebagai hasil dari pengaruh ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap efisiensi kinerja pemerintah. Ini karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05, dan signifikansi terhadap efisiensi juga dipengaruhi.

d. Uji Hipotesis (Y₁)

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis (Y₁)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.929	0.079		24.495	0.000
Belanja Pegawai	-0.026	0.007	-0.237	-3.490	0.004
Belanja Barang	-0.065	0.005	-0.872	-13.044	0.000
Belanja Modal	-0.002	0.002	-0.049	-0.761	0.460

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

Hasil uji dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai signifikansi 0,004, variabel X2 0,000, dan variabel X3 memiliki nilai signifikansi 0,460. Nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai dan barang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintahan. Sementara variabel X3 memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintahan.



Pembahasan Hasil Penelitian

1) Pengaruh Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Anggaran adalah inti dari operasi pemerintahan. Anggaran adalah alat penting untuk stabilisasi dan alokasi sumber daya, perencanaan dan pengendalian organisasi, dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, Laporan Rrealisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan pusat dan daerah yang paling penting. Pengguna laporan dapat melakukan analisis kinerja laporan keuangan, seperti analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan, berdasarkan LRA. Pada daerah pemekaran, analisis belanja penting untuk dilakukan karena daerah tersebut baru didirikan dan memiliki anggaran belanja yang terbatas. Dengan nilai anggaran yang terbatas ini, realisasi belanja harus dilakukan dengan efisien dan seimbang untuk memungkinkan pembangunan daerah dilakukan dengan tepat sasaran.

Belanja pegawai, di sisi lain, adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer yang bertugas di dalam dan di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi pemerintah.

Ketahuilah bahwa rasio efisiensi kinerja pemerintah digunakan untuk menentukan seberapa besar penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Tidak ada standar yang dianggap ideal untuk rasio efisiensi ini, karena angka yang dihasilkannya tidak absolut, tetapi relatif. Jika rasio efisiensi anggaran pemerintah kurang dari seratus persen, itu dianggap efisiensi; jika lebih dari itu, itu menunjukkan bahwa anggaran telah dibuang.

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,004, yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai berdampak positif pada efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Dengan kata lain, semakin besar realisasi anggaran belanja pegawai, semakin efisiensi kinerja pemerintah. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa nilai thitung -0,237 lebih kecil dari ttab. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil dari Darwis (2015), yang menunjukkan bahwa belanja pegawai memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, dan Susilowati (2012), yang menunjukkan bahwa belanja pegawai negeri sipil tidak berdampak signifikan pada capaian kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handoko (2014), yang menyatakan bahwa menyajikan anggaran yang didasarkan pada kinerja sudah efisien, yang dapat dilihat dari perbandingan antara anggaran dan hasilnya, serta seberapa jauh rencana program kerja dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu hasil positif dan signifikan dari penelitian ini adalah peningkatan efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai akibat dari realisasi anggaran pegawai yang semakin meningkat.

2) Pengaruh Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja barang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh koefisien untuk variabel kesenjangan realisasi anggaran belanja barang sebesar 0,000 yang berarti apabila realisasi anggaran belanja



barang semakin meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya efisiensi kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} -0,872 > t_{tabel} -13,044$ signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan realisasi anggaran belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Berbeda dengan hasil dari Susilowati (2012), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa tidak berdampak signifikan pada capaian kinerja.

Studi Honga dan Ilat (2014) menyatakan bahwa anggaran terealisasi dengan baik karena tidak melebihi target. pemahaman teknis tentang bagaimana menerapkan sistem akuntansi pemerintah untuk mencapai kinerja keuangan pemerintah yang baik. Laporan realisasi anggaran menunjukkan pelaksanaan yang tepat dari anggaran pendapatan, belanja, dan kinerja keuangan.

Salah satu hasil positif dan signifikan dari penelitian ini adalah peningkatan efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai akibat dari realisasi anggaran barang yang semakin meningkat.

3) Pengaruh Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

uang yang digunakan untuk membeli aset atau meningkatkan nilai aset yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa koefisien untuk variabel kesenjangan realisasi anggaran belanja modal sebesar 0,460, yang berarti bahwa peningkatan realisasi anggaran belanja modal akan berdampak pada peningkatan efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Di sisi lain, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} -0,049$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} -0,761$ dan koefisien untuk variabel kesenjangan realisasi anggaran belanja modal sebesar 0,460 lebih Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Darwis (2015), yang menunjukkan bahwa belanja modal memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, Susilowati (2012) menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak terpengaruh secara signifikan oleh belanja modal.

Dimungkinkan untuk menjelaskan pengaruh negatif dan tidak signifikan dalam penelitian ini dengan fakta bahwa anggaran belanja modal yang semakin meningkat tidak berdampak signifikan pada peningkatan efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

4) Pengaruh Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Menurut hasil uji t, variabel X1 (belanja pegawai) memiliki nilai signifikansi 0,004, variabel X2 (belanja barang) 0,000, dan variabel X3 (belanja modal) memiliki nilai signifikansi 0,460. Nilai signifikansi masing-masing variabel ini kurang dari 0,05. Menurut nilai tersebut, belanja barang dan pegawai berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintahan. Sebaliknya, variabel X3 memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintahan. Namun, nilai F sebesar 80,564 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 diperoleh ketika ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai, barang, dan modal terhadap efisiensi kinerja pemerintah secara bersamaan



dipengaruhi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai signifikansi lebih rendah dari 5%, atau 0,05.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diberikan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai berdampak positif pada efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Oleh karena itu, peningkatan realisasi anggaran belanja pegawai akan berdampak lebih baik pada efisiensi kinerja pemerintah.
2. Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja barang berdampak positif dan signifikan pada efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Dengan demikian, peningkatan realisasi anggaran belanja barang akan berdampak pada peningkatan efisiensi kinerja pemerintah.
3. Peningkatan realisasi anggaran belanja modal tidak berdampak positif atau signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Oleh karena itu, peningkatan realisasi anggaran belanja modal tidak akan berdampak positif atau signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah.
4. Secara keseluruhan, ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal akan berdampak positif dan signifikan pada efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Dengan demikian, peningkatan realisasi anggaran belanja barang, belanja barang, dan belanja modal akan berdampak positif pada efisiensi kinerja pemerintah.
5. Sumber Daya Manusia di satuan kerja tingkat pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, terutama bagian keuangan, memiliki kualitas yang baik meskipun kuantitasnya lebih sedikit. Ini sangat berbeda dengan Sumber Daya Manusia di tingkat propinsi, di mana pergantian pengelola keuangan yang lama ke yang baru menyebabkan kesulitan dan mempengaruhi laporan keuangan yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 272-283.
- Bastian, I. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, R. Y., & Wokas, H. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 82-89.
- Darwanis, D., & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal telaah dan riset akuntansi*, 6(2), 150-174.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (studi empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Erlina, R. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Fahrianta, R. Y., & Carolina, V. (2016). Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 13(1).



- Handoko, A.W. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 12 (2014).
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Honga, A.F., & Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 278-288.
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26.
- Kadim, A., & Sunardi, N. (2022). Financial Management System (QRIS) based on UTAUT Model Approach in Jabodetabek. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Mahmudi, M. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan : Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Mohammad, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (public sectors accounting)*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Muhibtari, A. N. (2014). *Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota magelang untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota magelang tahun anggaran 2008-2012*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Munandar, M. (2001). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja. Pengawasan Kerja. Edisi Pertama. Universitas Gajah Mada: BPFE*.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: salemba empat.
- Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 4, 204-213
- Nomor, P. P. (8). Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. *Melalui (www.google.com)*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi sulawesi tengah. *Accountability*, 2(1), 1-10.
- Palilingan, A.F., Sabijono, H., Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 17-25.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Perwira, M. Y. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007-2013. *Jurnal kinerja keuangan*.

- Pratolo, S., & Yudha, B. S. (2011). Peran Faktor-Faktor Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 144-160.
- Prihatiningsih, A., & Syamsuddin, H. M. (2013). Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tebo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 97-108.
- Rahayu, K. P., & Sanjaya, R. (2022). Pengaruh Loan to Deposit Ratio dan Beban Operasional Per Pendapatan Operasional Terhadap Return on Asset Pada PT. Bank Mega Tbk Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 5(2), 138-153.
- Sanjaya, R, Rahayu, K.P., & Lativa. (2022). Analysis of Net Profit Margin, Current Ratio, and Total Assets Turnover to Assess Financial Performance at PT Kalbe Farma Tbk Period 2017-2021. *In Adpebi Science Series, Proceedings of Adpebi International Conference on Management, Education, Social Science, Economics and Technology (AICMEST)* (Vol. 1, No. 1).
- Sanjaya, R. & Rahayu, K.P. (2020). The Influence of Fundamental Factors and Macroeconomics Against Dividend Payout Ratio and Company Value in LQ45 Non-Banking Registered Companies on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, Vol. 2 (5) (1053-1065).
- Sanjaya, R. (2019). The Influence of Ratio Analysis to The Dividend Payout Ratio and Its Impact on The Value of The Company Listed On The Malaysia Stock Exchange. *Economic & Accounting Journal*, Vol. 2 (2) (95-103), Universitas Pamulang.
- Sanjaya, R. (2020). The Impact of Source and Use of Funds on Liquidity at PT. Mustika Ratu Tbk. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, Vol. 3 (2) (158-165).
- Sanjaya, R. (2022). Pengaruh GPM, DER dan EPS Terhadap Harga Saham Pada PT. Adhi Karya (Perseroan), Tbk yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 6(1), 11-24.
- Sanjaya, R., Lativa, & Rahayu, K. P. (2022). Analysis Of The Efficiency Of Use Of The Expenditure Budget In The Directorate General Of Public Health Ministry Of Health Republic Of Indonesia. *In Adpebi Science Series, Proceedings of Adpebi International Conference on Management, Education, Social Science, Economics and Technology (AICMEST)* (Vol. 1, No. 2).
- Sanjaya, R., Rahayu, K.P., & Lativa. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Dan Bukti-Bukti (Kecukupan dan Kelayakan) Audit Terhadap Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian “Studi Penelitian Di Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Selatan. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 5(2), 171-185.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sunardi, N., & Tatariyanto, F. . (2023). The Impact of the Covid-19 Pandemic and Fintech Adoption on Financial Performance Moderating by Capital Adequacy . *International Journal of Islamic Business and Management Review*, 3(1), 102–118. <https://doi.org/10.54099/ijibmr.v3i1.620>
- Susilowati, M. (2012). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

